TANTANGAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP ERA DIGITAL YANG DINAMIS

Balqis Tsabitah Azzahrah¹, Irwan Triadi²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jalan RS.
Fatmawati, Jakarta Selatan.

¹2310611147@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²irwantriadi1@yahoo.com

ABSTRAK

Pemerintahan merupakan unsur yang sangat penting pada sebuah negara, begitu pula mengenai Hukum Ketatanegaraan yang menjadi pilar penting dalam pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut juga sebagai era digital semakin hari semakin pesat, banyaknya sistem-sistem di dunia yang berubah seiring dengan perkembangan era digital tersebut, tanpa terkecuali adalah perubahan pada Hukum Tata Negara dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, era digital dapat dikatakan sebagai sebuah tantangan maupun sebagai pembuka peluang, seperti misalnya pada Hukum Tata Negara di Indonesia yang mulai berkaca pada perkembangan era digital sehingga harus membuat sistem-sistem atau kebijakan sesuai yang tentu saja dalam prosesnya akan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang baru pula mengenai pemikiran yang baru tersebut, begitu pula mengenai dampak-dampak yang diakibatkan oleh era perubahan digital yang mana sifat pada perubahan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah dinamis yaitu selalu berubah-ubah. Tetapi juga tak jarang perubahan yang terjadi menjadikan kemajuan pada Hukum Tata Negara. Dalam mengkaji mengenai pembahasan Hukum Tata Negara dengan perkembangan digital, tidak lupa adanya komponen terpenting dalam penulisan karya tulis ilmiah, yakni metode penelitian. Menyesuaikan pembahasan pada penelitian saya mengenai Tantangan yang dihadapi Hukum Tata Negara terhadap Era Digital yang Dinamis, maka saya akan berfokus pada penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data-data yang relevan. Dapat disimpulkan bahwa digitalisasi yang merupakan perubahan bersifat meningkatkan efisiensi sesuatu jika dikelola dengan optimal dapat memberikan dampak negatif pula apabila tidak dikelola dengan sesuai dan tidak adanya kesiapan. Hukum Tata Negara yang merupakan pilar utama pada pemerintah harus memiliki persiapan dan bentuk adaptasi yang sesuai agar pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya. Dari pemaparan tersebut maka akan dibahas mengenai apa saja pengaruh yang timbul dari perkembangan era digital tersebut, adaptasi apa saja yang diupayakan oleh Hukum Tata Negara Indonesia dalam menghadapi era digital, kemudian akan dibahas pula mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perubahan Hukum pada perkembangan era digital dalam konteks Hukum Tata Negara. Pembahasan-pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan kebijakan Hukum Tata Negara yang diperlukan dalam mengatasi tantangan pada era digital.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Era Digital, Perkembangan, Perubahan, Tantangan

ABSTRACT

Government is a very important element in a country, as well as Constitutional Law which is an important pillar in government. The development of information and communication technology or also known as the digital era is increasingly rapid, many systems in the world are changing along with the development of the digital era, without exception is the change in Constitutional Law in the face of the development of information and communication technology. Therefore, the digital era can be said to be a challenge as well as an opening of opportunities, such as for example in Indonesian Constitutional Law which began to reflect on the development of the digital era so that it had to make systems or policies accordingly which of course in the process would be faced with new challenges regarding the new

thinking, as well as the impacts caused by the era of digital change where the nature of changes in information and communication technology is dynamic, which is always changing. But also not infrequently the changes that occur make progress on Constitutional Law. In examining the discussion of Constitutional Law with digital developments, do not forget the most important component in writing scientific papers, namely the research method. Adjusting the discussion in my research on the Challenges faced by Constitutional Law in the Dynamic Digital Age, I will focus on normative juridical research. The normative juridical research method is a library legal research carried out by examining library materials or relevant data. It can be concluded that digitization, which is a change that increases the efficiency of something if managed optimally, can also have a negative impact if it is not managed properly and there is no readiness. Constitutional Law, which is the main pillar of the government, must have appropriate preparations and forms of adaptation so that the government can run properly. From this explanation, it will be discussed about what influences arise from the development of the digital era, what adaptations are sought by Indonesian Constitutional Law in facing the digital era, then it will also discuss issues related to legal changes in the development of the digital era in the context of Constitutional Law. These discussions are expected to provide an overview of the changes in Constitutional Law policies needed to overcome the challenges of the digital era.

Keywords: *Constitutional Law, Digital Era, Development, Change, Challenge*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Hukum Tata Negara adalah sebuah sistem perundang-undangan atau peraturan yang memaparkan mengenai badan-badan yang diperlukan sebuah negara disertai dengan kewenangan-kewenangan apa saja yang bersangkutan dengan badan-badan tersebut, hubungan antara badan dan kewenangannya, hubungan satu sama lain antar badan-badan negara, serta hubungannya kepada negara. Istilah hukum tata negara atau yang disingkat menjadi HTN berasal dari kata "Hukum", "Tata", dan "Negara" yang mana singkatnya ketiga hal tersebut membahas mengenai urusan penataan negara, jika diuraikan maka makna dari kata "Hukum" sendiri adalah seperangkat peraturan atau kaidah dalam bersikap atau bertingkah laku yang apabila dilanggar maka akan dikenai sanksi, kemudian kata "Tata" dapat dikaitkan dengan kata "Tertib" atau dalam istilah disebut *order* yang dapat diartikan pula sebagai tata tertib. Maka dapat dicermati bahwa arti dari kata "Tata" negara berarti sistem penataan sebuah negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Hukum Tata Negara jika dilihat dari pemaknaan katanya adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau kenegaraan, dan mekanisme mengenai hubungan antara struktur negara dengan warga negaranya. Singkatnya Hukum Tata Negara adalah ilmu yang menyajikan aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh sebuah organisasi besar yang disebut sebagai negara.¹

Digitalisasi adalah sebuah proses perubahan yang terjadi pada teknologi yang semula bersifat analog kemudian menjadi teknologi yang bersifat digital. Tujuan dari digitalisasi ini tentu saja untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja bagian dari sebuah sistem, sehingga waktu sumber daya yang dimiliki dapat diolah secara optimal semaksimal mungkin. (Verihubs, 2022) Manusia sebagai pengguna sebuah teknologi pasti menginginkan sesuatu yang bersifat memudahkan maupun mengefisienkan waktu dan tenaga dalam segala

¹ Renata Christha Auli, S.H, "Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli" (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-tata-negara-menurut-para-ahli-lt62eb69953366e/>)

kegiatan. *Head of Strategy and Planning PHD Asia Pacific*, menjelaskan bahwa terdapat lima tahapan evolusi teknologi masa depan yang tumpang tindih.²

Tahapan paling awal adalah munculnya tahapan 'perubahan' dimana hal ini berlangsung pada tahun 1950 hingga 1995 yaitu ketika informasi dapat diperoleh melalui komputer yang dapat terhubung pada internet (Littlejohn, 2014). Kemudian tahapan kedua mengenai 'mengorganisir' atau yang dikenal sebagai *Organize* (1990-2015) yaitu ketika pengguna teknologi mengorganisir materi internet yang dapat diakses ke seluruh dunia dan memiliki nilai tambah yang lebih luas. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan 'mengeksktraksi' atau yang disebut sebagai *Fase Unbundling* (2010-2025) yang ditandai dengan penggunaan gadget pintar, *Internet of Things*, kecerdasan buatan, dan asisten virtual untuk mempercepat komunikasi global. Kemudian pada tahapan keempat yaitu 'mengantisipasi' atau dijuluki sebagai *Foresight* (2020-2035) dimana kecerdasan buatan dapat memahami lebih dalam mengenai keinginan masyarakat, dan yang terakhir adalah tingkatan 'mengangkat' yaitu tahapan pengenalan teknologi yang mendukung kecerdasan buatan yang dapat mengubah cara berinteraksi yang dijuluki sebagai *Lifting* 2030-2050 (Reza, 2017).³

Perkembangan era digital dapat dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 yaitu revolusi yang ditandai dengan integrasi teknologi canggih seperti *Internet of Things (IoT)*, kecerdasan buatan (AI), dan analisis data besar ke dalam proses manufaktur⁴. Karena adanya revolusi industri tersebut perubahan dan perkembangan digitalisasi tentu saja akan berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan salah satunya adalah sistem hukum dan kebijakan penggunaan teknologi yang mana akan dibahas lebih rinci mengenai bagaimana hukum tata negara beradaptasi pada era digital yang terus berkembang. Tentu saja hukum tata negara harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada pada masyarakat untuk tercapainya tujuan yang sesuai, bentuk penyesuaian hukum tata negara dalam menghadapi era digital adalah dengan adanya perubahan pada beberapa regulasi-regulasi yang di dalamnya terkandung mengenai teknologi digital pada kebijakan tata negara yang relevan. Kebijakan yang diambil juga harus mencakup pada isu-isu seperti keamanan *cyber*, privasi data, dan kejahatan digital yang muncul akibat adanya digitalisasi.

Dalam penyesuaian dengan era digital yang ada tidak jarang akan menimbulkan beberapa kendala pula dalam prosesnya. Apalagi yang dibahas adalah mengenai hukum tata negara yang mana memiliki peran penting dalam menstabilkan dan menjaga keadilan sistem pemerintahan suatu negara agar terpenuhinya aspek-aspek yang ditangani oleh hukum tata negara. Beberapa kendala yang mungkin dapat terjadi adalah mengenai lanskap regulasi, terutama dalam hal keamanan siber, kekayaan intelektual, dan privasi data yang mana ketiga hal tersebut adalah poin penting dalam isu perkembangan era digital. Kesulitan-kesulitan yang terjadi sejalan dengan adanya peristiwa yang sedang dialami dunia saat ini, yaitu mensentralkan kebutuhan mendesak yang bertujuan untuk adaptasi peraturan yang menyeluruh. Pada tahap adaptasi tentu saja

² Ahmad Faris Rivaldi Harahap, Arifuddin Muda Harahap "Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Partisipasi Publik pada Pengambilan Keputusan Tata Negara" (<https://www.semanticscholar.org/paper/Peran-digitalisasi-dalam-meningkatkan-partisipasi-Harahap-Harahap/3019afd7fc1312e7e18550c04e423daca851902c>)

³ *Ibid.*

⁴ Herwantono Herwantono, Kalinjung Hasibuan, Loso Judijanto "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Sistem Hukum dan Kebijakan Penggunaan dalam Teknologi di Indonesia" (<https://www.semanticscholar.org/paper/Pengaruh-Revolusi-Industri-4.0-terhadap-Sistem-dan-Herwantono-Hasibuan/da4f8bcbb9ad821e890d1a74083d86829b9b2d08>)

sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara melindungi hak dan kepentingan serta sejalan pula dengan mempromosikan inovasi teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai apa saja yang akan dihadapi dan apa saja bentuk penyesuaian diri hukum tata negara di Indonesia terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi.⁵

2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis menemukan rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas pada artikel ini, diantaranya:

1. Bagaimana peran Hukum Tata Negara terhadap adaptasi yang harus fleksibel dengan perkembangan era digital yang pesat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Hukum Tata Negara pada perkembangan era digital?
3. Bagaimana perubahan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan Hukum Tata Negara pada era digital?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dibahas di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Hukum Tata Negara terhadap adaptasi fleksibel dengan perkembangan era digital yang pesat.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Hukum Tata Negara pada perkembangan era digital.
3. Mengetahui apa saja perubahan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan Hukum Tata Negara pada era digital.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan komponen penting dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, menyesuaikan pembahasan pada penelitian saya mengenai Tantangan yang dihadapi Hukum Tata Negara terhadap Era Digital yang Dinamis, maka saya akan berfokus pada penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data- data yang relevan. Penelitian dengan konsep yuridis normatif bertujuan untuk analisa hukum, peraturan, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hukum yang berlaku yang dijelaskan dengan sistematis dan logis, pendekatan analisis yuridis normatif adalah menggunakan analisis normatif sebagai bahan evaluasi pada suatu isu atau fenomena yang terjadi terhadap hukum yang berlaku, kemudian untuk analisis hasil pada yuridis normatif juga berfokus pada isu maupun fenomena dengan hukum yang berlaku.⁶ Penelitian ini juga menggunakan metode berpikir secara deduktif (rasional-empiris) yaitu cara berpikir dengan memahami sesuatu yang sifatnya umum dan disimpulkan pada sesuatu yang lebih bersifat khusus.⁷ Penelitian ini dilakukan menggunakan pengumpulan data seperti studi kepustakaan dan pengumpulan data sekunder melalui buku-buku, berita hukum, jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum yang berkaitan, kemudian data primer yang didapatkan langsung merujuk kepada Perundang-Undangan.

⁵ *Ibid.*

⁶ Penulis, "BAB IV METODE PENELITIAN", (<http://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383.pdf>)

⁷ Mayang Sari Lubis, "METODOLOGI PENELITIAN" (deepublish, 2018), h.49.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Hukum Tata Negara terhadap adaptasi yang harus fleksibel dengan perkembangan era digital yang pesat

Hukum yang saat ini berjalan tentu saja memiliki hubungan yang kuat dengan hukum pada masa lalu, hukum yang meliputi perubahan dan perkembangan pada masyarakat akan terus berubah dinamis sesuai dengan era yang dijalani dan tidak mungkin bersifat tetap. Hukum tata negara adalah unsur hukum pada negara yang sangat penting dan perubahannya pun akan mempengaruhi berjalannya sebuah organisasi yang disebut negara. Hukum tata negara mencakup mengenai hubungan antara pemerintahan dengan rakyat serta hubungan antar lembaga negara itu sendiri. Jika didefinisikan secara khusus maka hukum tata negara berurusan dengan perumusan, pengimplementasian, dan kontrol sebuah konstitusi, undang-undang, serta ketentuan undang-undang lainnya. Semua hal tersebut mencakup beberapa prinsip hukum tata negara yang harus dipatuhi, yaitu supremasi hukum yang merupakan asas fundamental yang mensyaratkan bahwa hukum sebagai panglima tertinggi negara, kemudian terdapat prinsip kedaulatan rakyat yang berarti kekuasaan pada sebuah negara berada ditangan rakyat sebagai penguasa kekuasaan, kemudian prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu perintah untuk melaksanakan tugas secara tertib, dan yang terakhir adalah pemisahan kekuasaan dimana mensyaratkan bahwa kekuasaan dalam sebuah negara harus dibagi-bagi secara horizontal antara tiga organ negara, yaitu eksekuti, legislatif, dan yudikatif.⁸

Prinsip utama pada hukum tata negara yaitu supremasi hukum yang merupakan landasan sangat penting juga paling mendasari mengenai semua kegiatan pada sebuah negara. Oleh karena itu, perlu diperhatikannya perkembangan dan perubahannya yang sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Seperti era sekarang yang biasa disebut sebagai era digital, era dimana memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum tata negara. Dampak pertama yang bisa dilihat adalah mengenai adanya perubahan fungsi lembaga hukum, lebih mudahnya mengakses informasi termasuk mengenai informasi peraturan perundang-undangan, selain kedua hal tersebut era digital juga dapat berdampak pada tantangan perlindungan data pribadi yang mana harus terus ditingkatkannya Undang-undang yang mengatur hal ini, kemudian dampak terakhir adalah mengenai munculnya tuntutan-tuntutan hukum baru terkait keamanan siber, hak cipta, maupun tata kelola internet. Semua hal tersebut akan berpengaruh kepada cara kerja lembaga-lembaga negara. Fleksibilitas hukum di indonesia sangat berpengaruh untuk pengadaptasian hukum tata negara terhadap era digital yang begitu pesat perkembangannya. Peraturan perundang-undangan harus dapat melindungi hak warga negara dalam aktivitas *cyber* seperti penipuan online, melindungi hak kekayaan intelektual, dan menghindari adanya informasi atau konten di internet yang menyesatkan.⁹

Supremasi hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan era digital dan memastikan dihormatinya supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan penggunaan teknologi pada pelaksanaan konstitusi tidak melanggar hak warga negara. Maka penting pula bagi negara untuk memperkuat kerangka hukum dan peraturan yang lebih memadai untuk melindungi data dan informasi digital serta hukumannya. Selain itu, perlu ditingkatkannya kapasitas dan kapabilitas aparat

⁸ Savina Anggun Lestari dkk “Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara di Era Digital” (<https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp-widyakarya/article/download/286/295>)

⁹ *Ibid.*

penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi dan data digital. Keberadaan hukum ini juga penting bagi pengimplementasian hukum tata negara pada era digital dengan adaptasi dan perkembangan kerangka hukum yang tepat serta memperkuat otoritas untuk menghadapi tantangan baru.¹⁰

Perkembangan era digital sangat mempengaruhi implementasi sistem hukum digital. Infrastruktur teknologi yang berkembang secara pesat menitik beratkan pada kendala atau tantangan dalam hal privasi data dan keamanan. Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Perlindungan data Pribadi (UU PDP), adanya badan perlindungan data independen yang melapor langsung ke presiden atau Kementerian Komunikasi dan Informatik (KOMINFO) yang mengatur perlindungan data masih belum terealisasi meskipun telah diamanatkan oleh UU PDP. Tantangan ini mendefinisikan konsensus hukum dan politik untuk perlindungan data yang komprehensif. Kemudian mengenai kesadaran dan kemampuan akan rasio keamanan siber yang masih kurang terintegrasi, dimana Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan lebih dari 1,6 miliar “anomali lalu lintas” pada tahun 2021 termasuk *malware*, trojan, dan upaya phishing di Indonesia. Kemudian mengenai masih minimnya koordinasi dan tata kelola keamanan siber.¹¹

2. Kendala yang dihadapi Hukum Tata Negara pada perkembangan era digital

Terdapat istilah-istilah yang muncul berkaitan dengan perkembangan dan perubahan era digital. Salah satunya adalah mengenai istilah *Cyberspace* yang dikenal sebagai istilah dunia virtual dan dunia maya yang mana hal ini memiliki beberapa karakteristik *without boundary, 24-hours on-line, Interactive, Hyperline, No license, No censorship and Efficiency*. Semua karakter tersebut dapat dikaitkan dengan problematikanya sendiri dalam konteks hukum. Munculnya *cyberspace* dengan *cybercommunity*-nya telah menimbulkan perpindahan sebagian aktivitas dan perilaku di dunia nyata ke dunia maya, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi perilaku masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat. Lebih rinci lagi Sudarto secara jelas menyatakan bahwa kemajuan teknologi mempunyai pengaruh pada pola kejahatan. Barda Nawawi Arief menyebutkan lebih eksplisit lagi bahwa *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan teknologi menjadi bagian dari perubahan pola-pola hubungan masyarakat yang selama ini terjadi, termasuk menjadikannya media sebagai media kejahatan¹²

Salah satu hal paling krusial pada era digital mengingat dengan tantangan yang timbul adalah mengenai perlindungan privasi dan keamanan data. Dengan meningkatnya penggunaan layanan online, data pribadi individu menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan. Selain itu juga terdapat kejahatan siber yang merupakan tantangan yang berkaitan dan termasuk kategori serius,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mochammad Tanzil Multazam, Aan Eko Widiarto “Digitalisasi pada Sistem Hukum: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia”

(<https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/1014/836?download=pdf>)

¹² Iskandar Wibawa “ERA DIGITAL (PERGESERAN PARADIGMA DARI HUKUM MODERN KE POSTMODERNISME”

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13737/10451>)

kejahatan ini dapat merusak infrastruktur paling penting, mencuri data sensitif, atau merusak reputasi. Jenis-jenis serangan meliputi peretasan situs web, perangkat lunak berbahaya (malware), serangan DDoS (Distributed Denial of Service), dan pencurian identitas.¹³ Kedua hal tersebut sangatlah berkaitan, jika dikaitkan dengan ranah pemerintahan maka kita dapat berkaca pada kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia mengenai kejahatan siber *website-website* pemerintahan. Kasus pertama terjadi pada tahun 2004 yaitu timbulnya informasi aneh pada situs web KPU, kemudian pada tahun 2020 terjadinya *hacktivism* yang mana pada saat itu web pemerintahan atau organisasi negara DPR RI down dan berganti nama, masih pada tahun yang sama terjadinya pula penyerangan terhadap *website* Sekretariat Kabinet RI yaitu sabotase perubahan tampilan dan nuansa pada situs tersebut, kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 kejahatan siber justru semakin meningkat yang mana terjadi pembobolan database Polri, Database Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang rusak, peretasan terhadap *website* BPJS Kesehatan, dan kebocoran data e-HAC Kemenkes¹⁴. Kasus yang tidak kalah meresahkan pula adalah kebocoran data pribadi penduduk pada situs gelap yang terjadi di tahun 2022. Tidak hanya kasus-kasus yang telah disebutkan, melainkan semua kasus siber yang telah terjadi di Indonesia merupakan cerminan bahwa masih kurang kompetennya hukum menangani hal ini.

Ketidakmampuan hukum modern dalam menghadapi dan menjangkau masalah dunia maya, menjadikan dunia maya dianggap sebagai dunia tanpa hukum. Prinsipnya, dunia maya tidak terlepas dengan realitas dunia nyata, karena orang atau korporasi yang terlibat hidup di dunia nyata. Maka seharusnya dunia maya merupakan media dan *cybercommunity* terikat dengan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief “perusakan dan pencemaran informasi di mayanara” yang dapat disebut sebagai *cyber damage* dan *cyber pollution* bagian dari *environmental crime* yang perlu dicegah dan ditanggulangi. Upaya ini jika dilihat dari sudut *criminal policy* adalah upaya penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik seperti dengan pendekatan penal pada hukum pidana, pendekatan teknologi pada *techno prevention* karena *cybercrime* sebagai salah satu bentuk dari *hi tech crime*, pendekatan budaya atau kultural, pendekatan moral/ edukatif dan pendekatan global atau kerjasama internasional. Jika dilihat dari penanganannya maka penyelesaian hukum pada era digital sulit mendapatkan manfaat apabila masyarakat tidak ikut andil di dalamnya, tetapi jika penanganan-penanganan yang terjadi efektif tentu saja akan membawa pengaruh yang sangat bermanfaat.¹⁵

3. Perubahan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan Hukum Tata Negara pada era digital

Kebutuhan akan perubahan regulasi dan undang-undang sangat diperlukan dalam menangani tantangan perkembangan era digital. Dalam menghadapi hal ini banyak negara yang telah mengadopsi pendekatan proaktif dalam merumuskan regulasi baru yang mengakui tantangan teknologi. Dengan menggabungkan aspek-aspek hukum yang tradisional dengan pemahaman tentang teknologi modern. Tantangan lainnya adalah mengenai bagaimana

¹³ Ratna Marselina Rajagukguk “Hukum dan Teknologi: Menghadapi Tantangan Hukum di Era Digital” (https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:InyH1YbLORcJ:scholar.google.com/+adaptasi+hukum+tata+negara+pada+%22era+digital%22&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2021&as_yhi=2023)

¹⁴ Achmad Farid “14 Kasus Cyber Crime di Indonesia yang Menggemparkan Warganet” (<https://www.exabytes.co.id/blog/kasus-cyber-crime-di-indonesia/>)

¹⁵ Iskandar Wibawa, Op. Cit.

pengaturan penggunaan teknologi dengan pengawasan dan pemantauannya. Hal ini harus mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat, hak individu, dan prinsip-prinsip etika yang mendasari hukum pada era digital, diskusi terbuka dan keterlibatan publik dalam merumuskan regulasi juga tidak kalah penting. Lembaga penegak hukum dan yudisial menjadi peranan penting dalam penegakan hukum pada konteks teknologi digital. Maka hukum harus memiliki pemahaman yang dalam mengenai isu-isu teknologi dan data untuk dapat menyelidiki dan mengejar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan siber, pelanggaran privasi, dan pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan dunia digital.¹⁶

Lebih spesifik, Hukum Tata Negara diperlukan untuk mengakomodasikan tantangan-tantangan yang sebelumnya telah dibahas. Hal pertama yang penting untuk dilakukan adalah mengenai perlindungan privasi, konstitusi perlu memberikan jaminan hak privasi yang kuat dalam menghadapi perkembangan digital. Hal ini mencakup pengaturan yang jelas tentang pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi oleh pihak swasta maupun pemerintahan. Konstitusi juga perlu melindungi dari penyalahgunaan data pribadi tersebut. Kemudian konstitusi juga perlu mengakomodasikan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers di lingkungan digital. Dengan adanya tantangan penyebaran berita palsu dan penyebaran konten merugikan, maka diperlukannya perlindungan yang seimbang dengan perlindungan terhadap kehormatan, privasi, dan keamanan individu. Selanjutnya diperlukan perubahan pada promosi akses yang adil dan setara terhadap teknologi informasi, yang mana hal ini dapat memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengakses dan memanfaatkan potensi yang ditawarkan teknologi informasi.¹⁷

Tidak hanya itu, konstitusi juga perlu pengaturan yang tepat dalam tanggung jawab dan akuntabilitas penggunaan kecerdasan buatan pada pengambilan keputusan publik. Perlindungan hak asasi manusia, termasuk privasi dan non diskriminasi sangat dibutuhkan. Perubahan konstitusi lainnya adalah mengenai hak kekayaan intelektual yaitu konstitusi sebaiknya dapat mengakomodasi hak cipta, paten, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam konteks digital. Hal terakhir yang perlu diperhatikan konstitusi dalam membuat perubahan sebagai penyeimbangan tantangan era digital adalah mengenai pendorongan keterlibatan publik dalam proses kebijakan yang berkaitan dengan teknologi informasi, keterlibatan publik ini juga mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik itu sendiri terhadap konstitusi. Dengan pengadopsian perubahan yang tepat, maka konstitusi akan menjadi instrumen efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi akibat pesatnya perubahan dan perkembangan era digital.¹⁸

D. Penutup

1. Kesimpulan

Konstitusi merupakan unsur hukum yang sangat penting bagi suatu negara, dan perubahannya mempengaruhi fungsi organisasi nasional. Semua hal tersebut mengandung beberapa prinsip Konstitusi yang harus dipatuhi yang

¹⁶ Ratna Marselina Rajagukguk, Op. Cit.

¹⁷ Rasji, Grace Avianti, Kent Edward "Dinamika Konstitusi dan Perubahan Hukum Tata Negara Sebuah Tinjauan Perubahan Konstitusi Di Era Digital"

(<http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5118>)

¹⁸ *Ibid.*

sejalan dengan Hukum Tata Negara. Prinsip paling dasar dan yang pertama adalah supremasi hukum yang merupakan asas fundamental yang mensyaratkan hukum sebagai panglima tertinggi negara. Kemudian disusul dengan prinsip selanjutnya mengenai asas kedaulatan rakyat. Kekuasaan negara berada di tangan rakyat yang menjadi penguasa kekuasaan. Berikutnya, asas *good governance* atau tata pemerintahan yang baik adalah tertibnya pelaksanaan tugas pada tata pemerintahan, dan yang terakhir adalah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang mensyaratkan sebuah negara membagi secara horizontal menjadi tiga bagian organ negara yakni, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pengembangan dan perubahan pada prinsip konstitusi harus sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Seperti saat ini, terjadinya perubahan dan perkembangan era digital yang begitu pesat sehingga menimbulkan dampak serta tantangan yang signifikan. Mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh era digital, salah satu hal terpenting di era digital adalah melindungi privasi dan keamanan data. Selain itu, terdapat kejahatan dunia maya yang menimbulkan tantangan terkait dan masuk dalam kategori serius, kejahatan ini dapat merusak infrastruktur paling penting, mencuri data sensitif, atau merusak reputasi. Semua kasus siber yang telah terjadi di Indonesia merupakan cerminan bahwa masih kurang kompetennya hukum menangani hal ini. Ketidakmampuan hukum modern dalam menghadapi dan menjangkau masalah dunia maya, menjadikan dunia maya dianggap sebagai dunia tanpa hukum.

Tidak hanya itu, dalam menghadapi perubahan dan perkembangan era digital ini banyak negara yang telah mengadopsi pendekatan proaktif dalam merumuskan regulasi baru yang mengakui tantangan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memperkuat kerangka hukum dan peraturan yang sesuai untuk perlindungan data dan informasi digital, serta hukumannya terkait kejahatan siber yang marak terjadi. Perlunya peningkatan kapasitas dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi dan data digital. Keberadaan undang-undang ini juga penting bagi implementasi Konstitusi di era digital, dengan mengadaptasi dan mengembangkan kerangka hukum yang tepat serta memperkuat kewenangan untuk menghadapi tantangan baru.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka konstitusi juga perlu pengaturan yang tepat dalam tanggung jawab dan akuntabilitas penggunaan kecerdasan buatan pada pengambilan keputusan publik. Hal terakhir yang perlu diperhatikan konstitusi dalam membuat perubahan sebagai penyeimbangan tantangan era digital adalah mengenai pendorongan keterlibatan publik dalam proses kebijakan yang berkaitan dengan teknologi informasi, keterlibatan publik ini juga mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik itu sendiri terhadap konstitusi. Dengan pengadopsian perubahan yang tepat, maka konstitusi akan menjadi instrumen efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi akibat pesatnya perubahan dan perkembangan era digital.

Upaya lain yang dapat dilakukan jika dilihat dari sudut *criminal policy* adalah upaya penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik seperti dengan pendekatan penal pada hukum pidana, pendekatan teknologi pada *techno prevention* karena *cybercrime* sebagai salah satu bentuk dari *hi tech crime*, pendekatan budaya atau kultural, pendekatan moral/ edukatif dan pendekatan global atau kerjasama internasional. Jika dilihat dari penanganannya, maka penyelesaian hukum pada era digital sulit mendapatkan manfaat apabila masyarakat tidak ikut andil di dalamnya, tetapi

jika penanganan-penanganan yang terjadi efektif tentu saja akan membawa pengaruh yang sangat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Lubis Sari, M. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN*. *deepublish*.

JURNAL

Harahap, A.F., & Harahap, A.M. (2023). Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*.

Herwantono, H., Hasibuan, K., & Judijanto, L. (2023). Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Sistem Hukum dan Kebijakan Penggunaan Dalam Teknologi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*.

Mochammad, T. M., & Aan, E. W. (2023). Digitalisasi pada Sistem Hukum: Pengaruh dan Tantangan. *Article Cyber Law*.

Rajagukguk, M. R. (2023). Hukum dan Teknologi: Menghadapi Tantangan Hukum di Era Digital. *coursework.uma.ac.id*.

Rasji, R., Avianti, G., & Edward, K. (2023). Dinamika Konstitusi Dan Perubahan Hukum Tata Negara Sebuah Tinjauan Perubahan Konstitusi Di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

Savina ,A. L., dkk. (2023). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara di Era Digital. *Jurnal Relasi Publik*.

Wibawa Iskandar. (2016). ERA DIGITAL (PERGESERAN PARADIGMA DARI HUKUM MODERN KE POSTMODERNISME. *ejournal.undip.ac.id*

_____. BAB IV METODE PENELITIAN. *E-journal.uajy*.

WEBSITE

Auli, S.H, R. C. (2023, Oktober 05). Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli. *hukumonline.com*.

Farid Achmad. (2022). 14 Kasus Cyber Crime di Indonesia yang Menggemparkan Warganet. *exabytes.co.id*.